PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2008
TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER
THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC
COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBERS
COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN
NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSETUJUAN
KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI
MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA
ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA
ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 13 Desember 2005 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Korea;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTEASTH ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA).

Pasal 1

Mengesahkan Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (persetujuan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 207

LAMPIRAN

PERSETUJUAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSETUJUAN
KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR
PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA
ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan Republik Korea.

MENGINGAT persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea, ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal tiga belas Desember 2005; dan

MENGINGAT LEBIH LANJUT Pasal 5.1 dari Persetujuan Kerangka Kerja, yang memberikan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam Persetujuan Kerangka Kerja dan Persetujuan lain yang akan ditandatangani berdasarkan persetujuan Kerangka Kerja.

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut :

Pasal 1
Definisi

Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, kecuali konteksnya mensyaratkan sebaliknya;

ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam;

Negara-negara Anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam secara bersama;

Negara anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam secara individual;

ketua adalah anggota dari suatu majelis arbitrase yang bertindak sebagai ketua majelis arbitrase;

pihak pemohon adalah setiap Pihak yang mengajukan permohonan konsultasi berdasarkan ayat 1 pasal 3;

Perjanjian-perjanjian terkait adalah :

- (a) persetujuan Kerangka Kerja;
- (b) persetujuan Perdagangan Barang dalam persetujuan Kerangka Kerja;
- (c) persetujuan ini;
- (d) setiap perjanjian lain yang ditandatangani antar para Pihak dalam Persetujuan Kerangka Kerja kecuali dinyatakan lain dalam persetujuan ini;

hari-hari adalah hari kalender, termasuk akhir pekan dan hari-hari libur;

Persetujuan Kerangka Kerja adalah persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea;

Korea adalah Republik Korea;

Para Pihak adalah Negara-negara Anggota ASEAN dan Korea secara bersama;

para pihak dalam suatu sengketa, atau para pihak yang sedang bersengketa adalah pihak pemohon dan pihak termohon;

Pihak adalah suatu Negara Anggota ASEAN atau Korea;

pihak termohon adalah setiap Pihak yang kepadanya permohonan konsultasi diajukan berdasarkan ayat 1 Pasal 3;

pihak ketiga adalah suatu Pihak, di luar para pihak dalam suatu sengketa, yang menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis sesuai dengan Pasal 7; dan

WTO adalah Organisasi Perdagangan Dunia.

Pasal 2 Cakupan dan Penerapan

1. persetujuan ini wajib berlaku berkenaan dengan penghindaran atau penyelesaian semua sengketa yang timbul antara para Pihak berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait. Kecuali diatur sebaliknya dalam persetujuan ini atau setiap perjanjian terkait lainnya, persetujuan ini wajib berlaku bagi semua sengketa antara para Pihak.
2. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur dari Persetujuan ini wajib berlaku dengan memperhatikan aturan-aturan dan prosedur-prosedur khusus atau tambahan mengenai penyelesaian

- sengketa, apabila ada, yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian terkait lainnya. Dalam hal terdapat pertentangan antara aturan-aturan dan prosedur-prosedur dalam Persetujuan ini dengan aturan-aturan dan prosedur-prosedur khusus atau tambahan mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam perjanjian terkait, aturan-aturan dan prosedur-prosedur khusus atau tambahan tersebut wajib berlaku. Dalam sengketa-sengketa yang melibatkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang mencakup lebih dari satu perjanjian terkait, jika ada pertentangan antara aturan-aturan dan prosedur-prosedur khusus atau tambahan dari perjanjian-perjanjian terkait tersebut, ketua majelis arbitrage, berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa, wajib menentukan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam sengketa tersebut dalam waktu sepuluh (10) hari setelah suatu permohonan oleh setiap pihak yang bersengketa.
3. Aturan-aturan Persetujuan ini dapat dimohonkan berkenaan dengan tindakan-tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan setiap perjanjian terkait yang dilakukan dalam wilayah suatu pihak oleh :
    - (a) pemerintah dan pihak berwenang di tingkat pusat, provinsi atau daerah; atau
    - (b) badan-badan non-pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan-kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah dan pihak berwenang di tingkat pusat, provinsi, atau daerah.
  4. Berdasarkan ayat 5, tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib mengurangi setiap hak dari para Pihak untuk mempunyai alternatif prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia berdasarkan setiap perjanjian lain, dimana mereka menjadi Pihak.
  5. Pada saat proses penyelesaian sengketa telah dimulai berdasarkan Persetujuan ini atau berdasarkan setiap perjanjian lain dimana para pihak dalam suatu sengketa merupakan pihak berkenaan dengan suatu hak atau kewajiban tertentu dari pihak tersebut yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait atau perjanjian lain dimaksud, forum yang dipilih oleh pihak pemohon wajib mengabaikan forum penyelesaian lain untuk sengketa dimaksud.
  6. Untuk maksud-maksud ayat 4 dan 5, pihak pemohon wajib dianggap telah memilih suatu forum saat permohonan tersebut diajukan atau dirujuk dalam suatu sengketa, suatu majelis penyelesaian sengketa sesuai dengan persetujuan ini atau setiap perjanjian lain dimana para pihak dalam suatu sengketa merupakan pihak.

Pasal 3 Konsultasi

1. Pihak termohon wajib memberikan pertimbangan dan kesempatan yang cukup untuk berkonsultasi berkenaan dengan permohonan konsultasi yang diajukan oleh pihak pemohon berkaitan dengan setiap hal yang mempengaruhi penafsiran, pelaksanaan atau